

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, Z. A. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Asikin, Z. (2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasanah, U. (2017). *Hukum Perbankan*. Surabaya: Setara Press.
- Khairandy, R. (2003). *Pokok-pokok Hukum Dagang Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sjahdeini, S. R. (1997). *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R. (2008). *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.

Subhan, M. H. (2014). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Susilowati, E. (2011). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Semarang: Badan Penerbit Undip Press.

Sutedi, A. (2012). *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi*. Bandung: Alfabeta.

Suteki, G. T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.

Suyatno, T. (1990). *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia.

Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.

JURNAL

- Edoardo Biyakto Putro, S. M. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan . *Arius*, 2207-2222.
- Eliezer Waruwu, A. S. (2025). Kontradiksi Perlindungan Hukum kreditor Separatis Dengan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Pelaksanaan Kepailitan . *Jurnal Kertha Semaya*, 2376-2386.
- Hamid, A. (2024). Status Utang Kreditor Sindikasi Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . *Jurnal Hukum Statuta*, 158-166.
- Harmain, M. F. (2015). Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Akibat Hukum Terhadap Kredit Macet . *Lex Et Societatis*, 102-108.
- Kevin Florentino Akbar, T. M. (2024). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Kredit Sindikasi Internasional . *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 63-81.
- Makmur, S. (2016). Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitor Pada Pengadilan Niaga Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah*, 3.
- Mantili Rai, P. E. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* , 97-108.
- Maria Clarisa Talia, M. H. (2022). Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya Untuk Memberikan Hasilnya Kepada Kreditor Preferen . *Jurist-Diction*, 2287-2310.

Podung, D. M. (2016). Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan. *Lex Crimen*, 49-56.

Tindangen, G. Y. (2018). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Sindikasi Secara Internal dan Eksternal Pada Bank Konvensional. *Lex Et Societatis*, 65-72.

Umardani, M. K. (2016). Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank DKI). *ADIL: Jurnal Hukum*, 90-110.

SKRIPSI

Mega Oktaria. 2009. *Kajian Yuridis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Arissa Anggraini. 2012. *Kewenangan Kreditur Sindikasi Dalam Hal Permohonan Pernyataan Pailit*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Danang Setiawan. 2018. *Pembayaran Piutang Kreditor Dalam Hukum Kepailitan*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.